



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANWAR ASHARI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 548161

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 727.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.648 m²/160 m² di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR, HASIL SENDIRI , Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. Tanah Seluas 3.600 m² di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR, HASIL SENDIRI , Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 2.543 m² di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 2.543 m² di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 1.559 m² di KAB / KOTA WAY KANAN, Rp. 60.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/36 m² di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
8. Tanah Seluas 1.800 m² di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 21.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA LISTRIK UWINFLY D70 Tahun 2024, HASIL



SENDIRI Rp. 2.000.000

3. MOTOR, YAMAHA VEGA R NEW Tahun 2007, HASIL SENDIRI

Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 151.650.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 11.050.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 910.700.000

III. HUTANG

Rp. 233.465.846

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 677.234.154

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.